

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA  
KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN KEDUNGDUNG  
KABUPATEN SAMPANG**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Abdul Manaf**

**NIM: 05040421114**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul manaf  
NIM : 05040421114  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Badan  
Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Kinerja  
Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung  
Kabupaten Sampang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2024

Saya yang menyatakan



Abdul Manaf

NIM. 05040421114

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Manaf  
NIM : 05040421114  
Judul : Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga bisa dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang munaosah.

Surabaya, 25 November 2024

Pembimbing



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60132 Telp. (031) 836 1121-0336  
 Website: <http://www.uin-siba.ac.id> Email: [info@uin-siba.ac.id](mailto:info@uin-siba.ac.id)

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama Abdul Manal

NIM 0804021114

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.  
 NIP. 196310151991031003

Penguji III

H. Ahmad Khubby Ali  
 S.Ag, M.Si  
 NIP. 197809202009011009

Penguji II

Prof. Dr. H. Muhi Fathoni Hassim, M.Ag.  
 NIP. 195601101987031001

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizam, Lc., M.H.  
 NIP. 202111005

Surabaya, 24 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
 Dekan,



M. Hidayatullah Mubtashih, M.Ag.  
 NIP. 1983271919032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Manaf  
NIM : 05040421114  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : 05040421114@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 januari 2025

Penulis

(Abdul Manaf)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”. Judul ini diangkat atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman yang tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan optimal. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yang dimasukkan oleh penulis yakni bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, dan kemudian akan ditinjau menggunakan *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga mendapatkan data mengenai peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep Hukum Islam yakni *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa daleman tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan kurang terlibatnya BPD dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini disebabkan karena tidak harmonisnya antara kedua lembaga tersebut. Selain itu temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Desa Daleman sering kali tidak peduli akan fungsi dan tugasnya, setelah ditelusuri lebih dalam hal ini disebabkan bahwa BPD Desa Daleman masih terdapat yang belum mengetahui akan tugas dan fungsinya tersebut. Dalam tinjauan *siyāsah dustūriyah*, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD memiliki kesamaan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh *Wilāyah al- Hisbah*.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD Desa Daleman yang tidak optimal, maka penulis memberikan saran: *pertama*, penyelenggara pemerintahan desa yakni BPD dan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa perlu menghadirkan harmonisasi, untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila diperlukan untuk menghadirkan keharmonisan, maka bisa membuat forum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1). *Kedua*, Alumni Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memberikan bimbingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa Daleman agar bisa menjalankan tugas maupun fungsinya dengan optimal.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MENURUT <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i></b> .....	<b>27</b>
A. Teori Umum <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	27
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	30
3. Konsep <i>Wilāyah al- Hisbah</i> .....	32
B. Teori Umum Badan Permusyawaratan Desa .....	36
1. Pengertian dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.....	36
2. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.....	38
C. Teori Umum Pengawasan .....	43
1. Pengertian Pengawasan .....	43
2. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa.....	47

3. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	49
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....</b>	<b>54</b>
A. Profil Umum Desa Daleman .....	54
1. Letak Geografis .....	54
2. Jumlah Penduduk .....	55
3. Keadaan Pendidikan Desa Daleman .....	55
4. Pemerintah Desa Daleman .....	56
B. Pemaparan Data Penelitian .....	62
1. Target Penelitian .....	62
2. Pemaparan Narasumber .....	63
C. Pelaksanaan Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa .....	70
D. Faktor penghambat Peran Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa....	74
<b>BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Daleman Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 .....	77
B. Analisis Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Desa terhadap Kinerja Kepala Desa .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>x</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>xv</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aan Supian. *Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Hadis*. Bengkulu: Cv Zigie Utama, 2019.

Abubakar, Al Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam : Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam Propinsi Nad, 2009.

Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Arayik. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Penerbit Nem, 2021.

Muchariman, Randi, dan Helmi Al Djufri. *Siyasah Kebangsaan*. Omera Pustaka, 2016.

M.Hum, Dr Ridwan, S. H. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara, 2020.

Iman, Rifqi Qowiyul dan Joni *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim Dan Hisbah*. Wawasan Ilmu, 2024.

Romly. *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Depublish, 2019.

### Jurnal

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012.

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, 2021.

Elviandri, dan Indra Perdana. “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” *Journal Equitable* 6, No. 1 (20 Mei 2021): 14–26. <https://doi.org/10.37859/Jeq.V6i1.2679>.

Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.”

*Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2 (15 Agustus 2020): 95–116.  
<https://doi.org/10.26418/Tlj.V4i2.41913>.

Hermawansyah, Ady, Ramli Ramli, Ilima Fitri Azmi, dan Ashar Muhammad.  
 “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  
 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Good Governance*, 19  
 Oktober 2023, 101–16. <https://doi.org/10.32834/Gg.V19i2.624>.

Huda, Miftahul. “Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam  
 Melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Desa Kedungpilang  
 Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Uu No. 6 Tahun  
 2014 Tentang Desa.” Peerreviewed. Iain Salatiga, 2021. [http://e-  
 Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/10899/](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10899/).

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraeni Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono Triono.  
 “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam  
 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash  
 Dusturiyah.” *As-Siyasi* 2, No. 2 (20 Desember 2022): 135–52.

Kisman Ady, Telly Muriyani, Moh. Daud Marasabessy, dan Amirudin Rumbouw.  
 “Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
 Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian  
 Timur,” No. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (2022).

M. Irfan Nashinin. “Analisis Fqih Siyāsah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan  
 Pemursyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Jagran  
 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.” Universitas Islam  
 Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Marlyana, Myrra, Agus Nurulsyam Suparman, dan Erlan Suwarlan. “Kompetensi  
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan  
 Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangandaran Kecamatan  
 Pangandaran,” 30 September 2021.  
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/878>.

- Nugraha, I. Gusti Made Bayu, I. Gusti Bagus Suryawan, dan I. Wayan Arthanaya. “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (27 November 2021): 584–89. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4141.584-589>.
- Pratono, Agus, Paisol Burlian, dan Izomiddin Izomiddin. “Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, No. 1 (13 Juni 2023): 1–22. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18992>.
- Purnama, Iswadi. “Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.” *Transparansi Hukum*, 18 November 2022. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3665>.
- Rato, Dominikus, Fendy Setyawan, dan Koko Roby Yahya. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perseptif Filsafat Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 1 (13 Februari 2023): 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Rozi, Fahrur. “Hisbah dalam Islam.” *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 10, No. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v10i1.11>.
- Sari, Yuliana, Yaritsha Yuna Nafthan Thyola, Rizki Bagus Hidayatulloh, dan Deden Najmudin. “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Hukum Di Aceh.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, No. 12 (11 Desember 2024): 41–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i12.7963>.
- Setyaningrum, Christine Ayu, dan Fifiana Wisnaeni. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 2 (29 Mei 2019): 158–70.
- Sunarti, Neti. “Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa.” *Dinamika : Jurnal*

*Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, No. 2 (21 Juli 2018): 46–55.  
<https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1413>.

Wianta, I. Made Prama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani.  
 “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 1 (20 Mei 2022): 82–87.  
<https://doi.org/10.22225/Ah.4.1.2022.82-87>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Ruang Desa Center. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” 17 Februari 2023.  
<https://ruangdesacenter.com/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-des/>.

Database Peraturan | Jdih Bpk. “Uu No. 6 Tahun 2014.” Diakses 5 Juli 2024.  
<http://peraturan.bpk.go.id/details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

Indonesia, Republik. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.” Diakses 28 Agustus 2024.  
[http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri\\_no\\_110\\_thn\\_2016\\_ttg\\_bpd](http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no_110_thn_2016_ttg_bpd).

### **Wawancara**

Nor Hasanah. Kepala Desa Daleman, 31 November 2024.

Helmi. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman, 30 November 2024.

Bahauddin. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daleman, 30 November 2024.

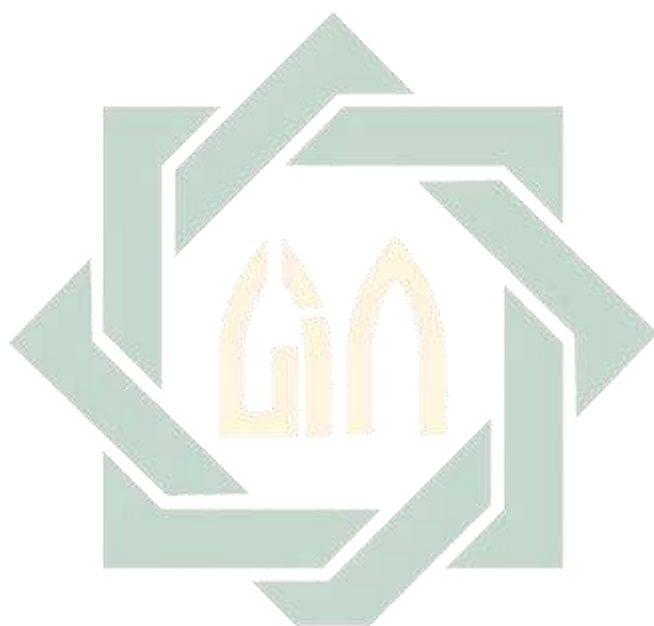
Nafatul Besyariah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daleman, 30 November 2024.

Moh.Shodiq. Perangkat Desa, 31 November 2024.

Ainawati. Perangkat Desa Daleman, 31 Oktober 2024.

Mathori. Masyarakat Desa Daleman, 1 November 2024.

Mustofa. Masyarakat Desa Daleman, 1 November 2024.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A